

ABSTRAK

Raisa Samantha Sudana (01656200060)

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA SENGKETA TANAH PERUSHAAAN EKS HINDIA BELANDA

(iv +105 halaman)

Tanah nasionalisasi Perusahaan eks Hindia Belanda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya berada pada Negara Republik Indonesia penguasaan hak atas tanahnya; dalam hal ini dikelola oleh BUMN yaitu PT Pertamina Persero, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pada Kasus yang dikaji terdapat pihak ketiga yang mengklaim hak kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional. PT Pertamina selaku penerima amanat tanah nasionalisasi melakukan upaya hukum, untuk mengukuhkan kepemilikan hak atas tanah tersebut; melalui pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020, tetapi gugatan tersebut ditolak; dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa PT Pertamina bukan pemilik hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normative dengan kata lain Penelitian kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan pada tesis ini adalah teknik deduktif analitis, dengan Metode Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tentang Nasionalisasi Perusahaan eks hindia belanda tidak langsung dapat menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah pada suatu lembaga atau badan hukum walaupun secara hukum positif status kepemilikan hak atas tanah Nasionalisasi diberikan kepada Negara untuk dikelola.

Referensi : 29 (1973-2020)

Kata Kunci : Hak atas tanah, Sengketa Hak Atas Tanah, Nasionalisasi Perusahaan eks Hindia Belanda

ABSTRACT

Raisa Samantha Sudana (01656200060)

JUDICIAL REVIEW OF LAND RIGHTS OWNERSHIP IN LAND DISPUTE OF EX-DUTCH EAST INDIES COMPANY

(iv + 105 pages)

The land for the nationalization of the former Dutch East Indies Company according to the applicable laws and regulations, should be in the State of the Republic of Indonesia controlling its land rights; in this case, it is managed by a State-Owned Company, namely PT Pertamina Persero, for the benefit of the Indonesian people. In the case studied, there is a third party who unilaterally recognized as ownership of the right to the land by submitting ownership rights to the National Land Agency. PT Pertamina as the recipient of the nationalization land mandate made legal efforts to confirm the ownership of rights to the land through the Central Jakarta District Court in 2020, but the lawsuit was rejected; with the consideration that PT Pertamina was not the owner of the rights to the land that was the object of the dispute. The methodology used in writing this thesis is normative juridical research in other words Literature research. The analytical technique used in this thesis is an analytical deductive technique, with a Statutory Approach Method and a case approach. The results of this study show that the laws and regulations on the Nationalization of Companies ex-Dutch East Indies cannot directly become the basis for ownership of land rights in an institution or entity even though it is legally positive that the ownership status of nationalization land rights is given to the state to be managed.

Reference : 29 (1973-2020)

Keywords : Land Right, Dispute, Land nationalization of the ex- Dutch East Indies Company